

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PROGRAM	: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
KEGIATAN	: PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
NILAI	: Rp. 627.800.000,-
INDIKATOR KELUARAN	: Penatausahaan Keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban fisik maupun keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka diperlukan adanya bentuk kegiatan penatausahaan keuangan yang terkelola dengan baik agar pertanggungjawaban keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggran 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 903/278/Sekr-2019 tanggal 29 Januari 2019.

2. Tujuan

Penatausahaan Keuangan terkelola dengan baik agar pertanggungjawaban keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 2.00.2.00.04.005.002.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung						
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
5. 2.	BELANJA LANGSUNG				627,800,000	
5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI				627,800,000	
5 2 1 01	Honorarium PNS				576,600,000	
5 2 1 01 0003	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah				528,600,000	
	- Honor Pengguna anggaran (1 orang x 12 bulan)	12	OB	1,400,000	16,800,000	
	- Honor kuasa pengguna anggaran (1 orang x 12 bulan)	12	OB	850,000	10,200,000	
	- Honor kuasa pengguna anggaran (1 orang x 12 bulan)	12	OB	750,000	9,000,000	
	- Honor kuasa pengguna anggaran (4 orang x 12 bulan)	48	OB	650,000	31,200,000	
	- Honor kuasa pengguna anggaran (8 orang x 12 bulan)	96	OB	600,000	57,600,000	
	- Honor kuasa pengguna anggaran (2 orang x 12 bulan)	24	OB	550,000	13,200,000	
	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang x 12 bulan)	12	OB	950,000	11,400,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (2 orang x 12 bulan)	24	OB	700,000	16,800,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 12 bulan)	12	OB	600,000	7,200,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (8 orang x 12 bulan)	96	OB	550,000	52,800,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (11 orang x 12 bulan)	132	OB	500,000	66,000,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (6 orang x 12 bulan)	72	OB	475,000	34,200,000	
	- Honor pejabat pelaksana teknis kegiatan (19 orang x 12 bulan)	228	OB	450,000	102,600,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan)	12	OB	800,000	9,600,000	
	- Honor Bendahara Penerimaan (1 orang x 12 bulan)	12	OB	325,000	3,900,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (2 orang x 12 bulan)	24	OB	450,000	10,800,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (7 orang x 12 bulan)	84	OB	400,000	33,600,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (2 orang x 12 bulan)	24	OB	350,000	8,400,000	
	- Honor pembantu bendahara (4 orang x 12 bulan)	48	OB	250,000	12,000,000	
	- Honor pembantu penatausahaan keuangan (3 orang x 12 bulan)	36	OB	250,000	9,000,000	
	- Honorarium	1	OB	12,300,000	12,300,000	
5 2 1 01 0006	Honorarium Pengelola SIPKD				36,000,000	
	- Honor operator Pertanggungjawaban (2 org x 12 bln)	24	OB	500,000	12,000,000	
	- Honor operator Penatausahaan (1 org x 12 bln)	12	OB	500,000	6,000,000	
	- Honor operator Penganggaran (3 org x 12 bln)	36	OB	500,000	18,000,000	
5 2 1 01 0025	Honorarium Pengelola SIMSGAJI PNSD				12,000,000	
	- Honor operator Gaji (2 org x 12 bln)	24	OB	500,000	12,000,000	
5. 2. 1. 04	Honorarium Non PNS				51,200,000	
5. 2. 1. 04 0001	Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap	14	OB	2,800,000	39,200,000	
5 2 1. 04 0002	Honorarium Pengelola SIPKD				12,000,000	
	- Honor operator penatausahaan (1 org x 12 bln)	12	OB	500,000	6,000,000	
	- Honor operator penganggaran (1 org x 12 bln)	12	OB	500,000	6,000,000	

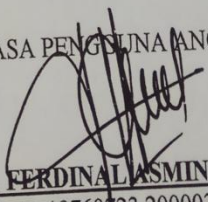
E. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Honorarium Pengelolaan SIPKD PNS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Honorarium Pengelolaan SIMGaji PNSD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Honorarium Pegawai Honor / Tidak Tetap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Honorarium Pengelolaan SIPKD Non PNS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

F. PENUTUP

Hasil Pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan SKPD berupa terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran sehingga tercapainya tujuan berupa penatausahaan keuangan terkelola dengan baik sehingga pertanggungjawaban keuangan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

KUASA PENGELUARA ANGGARAN


Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP
 NIP. 19760723 200003 1 003